

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Angger Sigit Pramukti, Meylani Chahyaningsih, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- Bagus Sarnawa, Hayu Sukiyoprati, 2007, *Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Lab Hukum.
- Cakra Arbas, 2012, *Jalan Terjal Calon Independen pada Pemilukada di Provinsi Aceh*, Jakarta, Softmedia.
- C.S.T Kansil, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramitha.
- Desi Fernanda, 2003, *Etika Organisasi Pemerintah*, Jakarta, Lembaga Administrasi Negara-Republik Indonesia.
- Ellydar Chaidir, 2008, *Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Yogyakarta, Total Media, hlm. 294.
- Irvan Mawardi, 2014, *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilukada*, Yogyakarta, Rangkang Education
- Janedri M Gaffar, 2012, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta, Kontpress.
- Miftah Thoha, 2008, *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Philippus M. Hadjon, R Sri Soemantri Martosoewignjo, Sjachran Basah, Bagir Manan, H M Laica Marzuki, J.B.J.M Ten Berge, P.J.J. Van Buuren, F.A.M. Stroink, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Rozali Abdullah, 2005, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- S.F. Marbun dan Mahfud M. D., *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1987.
- S.F. Marbun, 1998, *Reformasi Hukum Tata Negara, Netralitas Pegawai Negeri Dalam Kehidupan Politik Di Indonesia*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- Septi Nurwijayanti, 2009, *Politik Ketatanegaraan*, Yogyakarta, Lab Hukum.
- Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih, Tedi Sudrajat, 2014, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Yos Johan Utama, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Banten, Univeristas Terbuka
- W.J.S Poerwadarminta, 1986, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

Jurnal:

- Alizar Isna, "Netralitas Birokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah." *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 23, Nomor 2, Agustus 2010
- Janpatar Simamora, "Eksistensi Pemilukada dalam rangka mewujudkan Pemerintah Daerah yang Demokratis", *Jurnal Hukum*, Volume 23, Nomor 1, Februari 2011.
- Mat Zudi, Arief Hidayat, Untung Sri Hardjanto, "Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Kepala Daerah", *Diponegoro Law Jurnal*, Volume I, Nomor 4, Tahun 2012
- Rina Martini, "Netralitas Birokrasi dalam Pilgub Jateng 2013". *Jurnal Ilmu Sosial*. Volume. 14. Nomor 1. Juli 2015
- Rina Martini. "Politisasi Birokrasi di Indonesia", *Jurnal Ilmu Politik*, Volume. 1. Nomor 1, Magister Ilmu Politik, April 2010.
- Septi Nur Wijayanti, "Keterlibatan Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah", *Jurnal Konstitusi*, Volume. II, Nomor 1, September 2013.
- Sri Hartini, "Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS)". *Jurnal Dinamika Hukum. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto*. Volume. 9 Nomor 3, September 2009
- Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih, dan Tedi Sudrajat. "Kebijakan Netralitas Politik Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilukada (Studi di Jawa Tengah)", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2014
- Tatang Sudrajat, "Netralitas PNS dan Masa Depan Demokrasi dalam Pilkada Serentak 2015", *Jurnal Ilmu Administrasi*, Volume XII. Nomor 3, Desember 2015
- Yusdianto, "Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya", *Jurnal Konstitusi*, Volume II, Nomor 2, November 2010.
- Zamzami. "Kontroversi Netralitas PNS dalam Pilkada." *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume. I. Nomor 1, FH UMA, Maret 2009.

Web:

- Ana Islam, "Netralitas Birokrasi (PNS) dalam Pilkada Daerah Istimewa Aceh (Berdasarkan Azaz Adil dan Kepentingan Umum)", <http://ana19islam.blogspot.co.id/2012/06/netralitas-birokrasi-pns-dalam-pilkada.html>, diakses pada tanggal 4 April 2017 pukul 10.01 WIB.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, "Kabupaten Kulon Progo dalam Angka", https://kulonprogokab.bps.go.id/backend/pdf_publicasi/Kabupaten-Kulon-Progo-Dalam-Angka-2016.pdf, diakses pada tanggal 6 Agustus 2017 pukul 22.38 WIB.
- Bawaslu DIY, "Profil Lembaga", <http://bawaslu-diy.go.id/profiles/page/profile-lembaga.html>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2017 pukul 22.45 WIB.

- Dispen, “Netralitas PNS dalam Pilkada”, <http://dispenmaterikuliah.blogspot.co.id/2011/07/netralitas-pns-dalam-pilkada.html>, diakses pada tanggal 25 Maret 2017 20.55 WIB.
- GlosarId, “Arti Netralitas PNS”, <https://glosar.id/index.php/term/pengetahuan/80151-netralitas-pns-adalah.xhtml>, diakses pada tanggal 30 Maret 2017 pukul 14.07 WIB.
- J. Tjiptabudy, Fungsi dan Peran Panitia Pengawas Pemilu dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, <http://fhukum.unpatti.ac.id/htn-han/112-fungsi-dan-peran-panwaslu-dalam-sistem-pemilihan-umum-di-indonesia-kajian-dari-aspek-yuridis>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2017 pukul 13.26 WIB.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, “Profil KPU”, <http://kpkabkp.blogspot.co.id/p/tugas-dan-kewenangan-dalam-pasal-10.html>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2017 pukul 13.27 WIB.
- Mishba7, “Pengertian, Wewenang dan Tugas Kepala Daerah Bersama Wakil Kepala Daerah”, <http://www.mishba7.com/2015/11/pengertian-wewenang-dan-tugas.html>, diakses pada tanggal 2 April 2017 pukul 22.42 WIB.
- Panwas Jogja, “Press Release: Netralitas ASN Pada Pilwali Kota Yogyakarta 2017”, <http://www.panwasjogja.com/2016/08/press-release-netralitas-asn-pada.html>, diakses pada tanggal 4 April 2017 pukul 15.20 WIB.
- Rusliandy, “Netralitas Pegawai Negeri Sipil”, <http://rusliandy.blogspot.co.id/2009/06/netralitas-pegawai-negeri-sipil.html>, diakses pada tanggal 25 Maret 2017 pukul 20.21 WIB.
- Srikandi Rahayu, “Pengertian Pilkada atau Pemilukada”, <http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-pilkada-atau-pemilukada.html>, diakses pada tanggal 31 Maret 2017 pukul 15.26 WIB.
- Wikipedia, “Kepala Daerah”, https://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_daerah, diakses pada tanggal 2 April 2017 pukul 22.23 WIB.
- Wikipedia, “Kabupaten Kulon Progo”, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kulon_Progo, diakses pada tanggal 6 Agustus 2017 pukul 21.22 WIB.
- Wikipedia, Pemilihan Umum di Indonesia, https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_di_Indonesia, diakses pada tanggal 10 Agustus 2017 pukul 13.20 WIB.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2000;

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 010/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;